WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 164 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ((Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I. PENDAHULUAN;
b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
d. BAB IV. PENUTUP.

(3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.

(2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

(3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1504

Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah

BATAM

PERUBAHAN RENCANA KERJA BPKAD TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Dokumen Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, Juli 2024
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

PEMERINTAH KOTA BATAM BPKAD

Abd. Malik, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 196607271996031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN) **8**

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan) 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 18

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 21

BAB IV PENUTUP **38**

4.1 Catatan Penting 38

4.2 Kaidah Pelaksanaan 38

4.3 Rencana Tindak Lanjut 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 T. C. 29. Rekaptulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II/Juni Tahun 2024 10
Tabel 2. 2 T.C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sampai denga triwulan II/Juni tahun 2024 17
Tabel 3. 1 Rincian Program, Kegiatan,, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan dan bidang aset;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan dan bidang aset ;
c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan dan bidang aset;
d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Badan.

Dalam Pemerintah Kota Batam peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, sangat vital sekali yaitu sebagai *stakeholders* dalam menggali Pendapatan Daerah dan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kota Batam.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No.41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
21. Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100).
24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : (7,44/2021))
25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor

6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);

26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
28. Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1192).
29. Peraturan Walikota Batam Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024, dan memberikan gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan Kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam tahun 2024.

Adapun tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024 adalah:

a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Batam tahun 2024.

b. Membuat acuan keberlanjutan perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam tahun 2024 yang memuat hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan

dan perubahan keberlanjutan target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rancangan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

2.1 Landasan Hukum

3.1 Maksud dan Tujuan

4.1 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting

4.2 Kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024 juga dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

b. Tujuan yang dikehendaki;

c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

a. Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Capaian kinerja indikator kinerja utama Kota Batam terkait dengan urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menunjukkan kinerja yang baik. Indikator sampai triwulan II tahun 2024 mencapai 50% dari target yang ditetapkan.

Tabel 2. 1 T. C. 29. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 s/d Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2024)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
	1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5						**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5	**02**					**KEUANGAN**				
5	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**75%**	**75%**
5	**02**	**01**	**02**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**75%**	**75%**
5	02	01	02	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/Bulan	75 Orang/bulan	76,5%
5	**02**	**01**	**02**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**25%**	**25%**
5	02	01	02	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	4 Orang	10%

5	**02**	**01**	**02**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**50%**	**50%**
5	02	01	02	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
5	02	01	02	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	100%
5	02	01	02	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
5	02	01	02	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100%
5	02	01	02	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	02	01	02	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan	50%
5	**02**	**01**	**02**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**27%**	**27%**
5	02	01	02	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72 Unit	50 Unit	69,44%
5	02	01	02	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78 Unit	13 Unit	16,67%
5	02	01	02	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0%

5	**02**	**01**	**02**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**30%**	**30%**
5	02	01	02	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 Laporan	0%
5	02	01	02	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
5	**02**	**01**	**02**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi**	**100 %**	**25%**	**25%**
5	02	01	02	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	4 unit	100%
5	02	01	02	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	4 unit	100%
5	02	01	02	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	233 Unit	147 Unit	63%
5	**02**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**

5	**02**	**02**	**02**	**01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu**	**100%**	**50%**	**50%**
5	02	02	02	01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	02	02	02	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	02	02	02	01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5	02	02	02	01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	02	02	02	01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	02	02	02	01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang	0 Orang	0%
5	**02**	**02**	**02**	**02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**100 %**	**0%**	**0%**
5	02	02	02	02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	0 Dokumen	0%

5	02	02	02	02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	500 Orang	0 Orang	0%
5	**02**	**02**	**02**	**03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun**	**100 %**	**25%**	**25%**
5	02	02	02	03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	11 Laporan	0 Laporan	0%
5	02	02	02	03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	100%
5	02	02	02	03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	02	02	02	03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	0 Orang	0%
5	**02**	**02**	**02**	**04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Dana Tidak Terduga yang Tersedia**	**100%**	**0%**	**0%**

						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	0 Laporan	0%
5	**02**	**02**	**02**	**05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Presentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah**	**100 %**	**0%**	**0%**
5	02	02	02	05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	**02**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti**	**100%**	**50%**	**50%**
5	**02**	**03**	**02**	**01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi**	**100%**	**50%**	**50%**
5	02	03	02	01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
5	02	03	02	01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	02	03	02	01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan	0%
5	02	03	02	01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan	0%
5	02	03	02	01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
5	02	03	02	01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%

5	02	03	02	01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
5	02	03	02	01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	02	03	02	01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	0 Laporan	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dapat dilihat pada tabel 2.2 terlampir.

Tabel 2.2 T.C.30 Pencapaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2024		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra tahun 2024 TW II		Catatan Analisis
1	*2*	*3*		*4*		*5*
1	Opini BPK	WTP	100%	WTP	100%	
2	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100%	100%	50%	50%	
3	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan APBD	Tepat waktu	100%	Tepat Waktu	100%	
4	Persentase laporan OPD yang lengkap sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset	100%	100%	50%	50%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

BPKAD Kota Batam yang berfungsi sebagai pengelola keuangan dan pengelola aset daerah mempunyai tujuan utamanya adalah Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel sehinggga dalam tujuan tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam menargetkan untuk setiap Tahun mendapat Opini WTP dari BPK.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi daerah;
2. Dana perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat;
3. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat;
4. Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk tahun ke depan;
5. Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan;
6. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk aplikasi SIPD;
7. Tingkat kemahiran aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah masih kurang;
8. Sarana dan Prasarana perkantoran milik BPKAD Kota Batam masih perlu ditingkatkan, baik dari kebutuhan barang dan pemeliharaan;

9. Aset yang dikuasai Pemerintah Kota Batam masih ada yang belum memiliki status yang jelas, belum tercatat dan belum terpelihara dengan baik;

10. Sistem pengaturan penyimpanan dokumen kearsipan masih kurang tertata dan sarana penyimpanan yang lebih memadai.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Keuangan daerah merupakan urat nadi bagi berjalannya roda pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan dalam menjalankan roda pemerintahan tersebut dibutuhkan pendanaan sebagai input bagi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, oleh karena itu pengelolaan keuangan harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Adanya pemisahan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi dua lembaga yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan sinergi secara internal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

APBD sebagai dokumen perencanaan keuangan tahunan merupakan dokumen sentral yang memiliki fungsi perencanaan, otorisasi, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Oleh karena itu pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses penyusunan APBD cukup banyak yaitu DPRD sebagai representasi dari kepentingan masyarakat, Eksekutif yang terdiri dari Walikota dan Wakil Walikota, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan SKPD selaku Pengguna Anggaran. Banyaknya pemangku kepentingan dalam proses penyusunan APBD menjadi tantangan dalam mensinergikan peran masing-masing sehingga penyusunan APBD dapat dilakukan sesuai dengan tahapan dan dapat ditetapkan secara tepat waktu.

Tantangan dalam pengembangan pengelolaan keuangan daerah adalah adanya kebijakan pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta pengembangan sistem pengendalian internal.

Dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan sehingga tantangan yang ada dapat diatasi, di antaranya adalah pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu:

1) Penyusunan Kebijakan keuangan daerah;
2) Penyusunan APBD;
3) Melaksanakan fungsi BUD;
4) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
5) Melaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Dengan kewenangan tersebut BPKAD dapat berperan dalam sinergitas pengelolaan keuangan daerah terutama dengan SKPD selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.

Kemudian, peluang lainnya adalah Kemampuan keuangan daerah yang terus meningkat yang ditandai dengan pertumbuhan nilai APBD yang terus meningkat, hal ini memberikan peluang bagi BPKAD Kota Batam untuk terus mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah baik dalam pengembangan regulasi, sarana prasarana termasuk teknologi informasi, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah.

Pertumbuhan pembangunan di Kota Batam yang cukup pesat baik dibidang ekonomi infrastruktur, termasuk pertumbuhan pemukiman dan perumahan dapat memberikan peluang untuk menggali potensi pendapatan daerah termasuk pendapatan dari retribusi pemanfaatan sewa lahan fasos/fasum.

2.3.4 Isu-Isu Penting/ Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu – isu Penting/Strategis Pelayanan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Regulasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya;
2. Kompentensi dan kualitas SDM terbatas;
3. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
4. Penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan singkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan Daerah;
5. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program yang diampu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada tahun 2024 meliputi 3 Program, 12 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024 memuat pergeseran atau penambahan atau pengurangan output sub kegiatan dan penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang dianggarkan dan di entri pada Aplikasi SIPD-RI, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**	**31.211.612.492,00**	**26.634.046.815,00**	**(4.577.565.677,00**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**23.423.006.736,00**	**21.972.473.915,00**	**(1.450.532.821,00)**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang /Bulan	80 Orang/Bulan	23.230.606.736,00	21.972.473.915,00	(1.258.132.821,00)	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-			192.400.000,00	0,00	(192.400.000,00)	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**565.607.500,00**	**438.960.000,00**	**(126.647.500,00)**	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	40 Orang	565.607.500,00	438.960.000,00	(126.647.500,00)	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**2.593.406.000,00**	**2.311.931.500,00**	**(281.474.500,00)**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	50.730.000,00	61.140.000,00	10.410.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	6 Paket	788.519.000,00	633.320.500,00	(155.198.500,00)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	80.021.000,00	130.448.000,00	50.427.000,00	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	5 Paket	700.970.000,00	676.665.000,00	(24.305.000,00)	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	16.200.000,00	14.400.000,00	(1.800.000,00)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	956.966.000,00	795.958.000,00	(161.008.000,00)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**1.696.207.500,00**	**1.047.535.000,00**	**(648.672.500,00)**	

	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72 Unit	52 Unit	287.806.000,00	165.261.000,00	(122.545.000,00)	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78 Unit	44 Unit	1.277.286.000,00	445.129.000,00	(832.157.000,00)	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	131.115.500,00	437.145.000,00	306.029.500,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**1.657.144.756,00**	**355.986.400,00**	**(1.301.158.356,00)**	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	8.784.000,00	2.520.000,00	(6.264.000,00)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.648.360.756,00	353.466.400,00	(1.294.894.356,00)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi**	**100 %**	**100 %**	**466.240.000,00**	**507.160.000,00**	**40.920.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	4 unit	161.120.000,00	161.010.000,00	(110.000,00)	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	4 unit	138.800.000,00	182.240.000,00	43.440.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	233 Unit	216 Unit	166.320.000,00	163.910.000,00	(2.410.000,00)	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku**	**Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**62.092.645.120,00**	**13.727.100.579,00**	**(48.365.544.541,00)**	

	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu**	**Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu**	**100%**	**100%**	**2.132.105.000,00**	**2.145.433.500,00**	**13.328.500,00**	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	192.570.000,00	154.268.000,00	(38.302.000,00)	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	158.890.000,00	115.620.000,00	(43.270.000,00)	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	505.595.000,00	661.451.000,00	155.856.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	496.404.000,00	567.418.000,00	71.014.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen	248.711.000,00	237.364.000,00	(11.347.000,00)	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang	1200 Orang	529.935.000,00	409.312.500,00	(120.622.500,00)	

	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaa n Daerah**	**Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**708.911.026,0 0**	**1.290.596.00 0,00**	**581.684.974,00**	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Doku men	1 Dokumen	25.991.660,00	6.360.000,00	(19.631.660,00)	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	682.919.366,00	1.284.236.000 ,00	601.316.634,00	

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun**	**Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun**	**100 %**	**100 %**	**1.195.391.000,00**	**410.026.000,00**	**(785.365.000,00)**	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	11 Laporan	11 Laporan	39.600.000,00	50.730.000,00	11.130.000,00	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	283.203.000,00	55.760.000,00	(227.443.000,00)	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang	6 Dokumen	6 Dokumen	205.300.000,00	303.536.000,00	98.236.000,00	

	tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	0 Orang	667.288.000,00	0,00	(667.288.000,00)	

	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Dana Tidak Terduga yang Tersedia**	**Persentase Dana Tidak Terduga yang Tersedia**	**100%**	**100%**	**57.257.489.725,00**	**9.320.693.079,00**	**(47.936.796.646,00)**	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	57.257.489.725,00	9.320.693.079,00	(47.936.796.646,00)	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah**	**Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah**	**100 %**	**100 %**	**798.748.369,00**	**560.352.000,00**	**(238.396.369,00)**	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Dokumen	1 Dokumen	798.748.369,00	560.352.000,00	(238.396.369,00)	

		Keuangan Daerah								
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti**	**Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti**	**100%**	**100%**	**2.879.101.346,00**	**3.977.084.000,00**	**1.097.982.654,00**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi**	**Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi**	**100%**	**100%**	**2.879.101.346,00**	**3.977.084.000,00**	**1.097.982.654,00**	
	Penyusunan Standar Harga	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	433.074.697,00	317.700.000,00	(115.374.697,00)	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	147.858.031,00	86.986.000,00	(60.872.031,00)	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	398.405.262,00	398.405.500,00	238,00	

	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	101.857.931,00	47.040.500,00	(54.817.431,00)	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.096.716.622,00	1.610.934.000,00	514.217.378,00	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	441.301.135,00	931.793.500,00	490.492.365,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	163.332.406,00	501.655.500,00	338.323.094,00	

	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanga nan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik daerah	1 Doku men	1 Dokumen	60.861.414,00	46.875.000,00	(13.986.414,00)	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Lapora n	1 Laporan	35.693.848,00	35.694.000,00	152,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta Target dan Sasaran Pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran P-APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Bahwa pelaksanaan atau realisasi dari Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada tahun-tahun sebelumnya telah dapat direalisasikan secara baik;
2. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024;

2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja PD.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain:

1. Penggunaan anggaran APBD Kota Batam se-efektif mungkin dan tepat sasaran;

2. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yang telah diusulkan dan ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024.

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI